GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Suara pembaruan**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**12 November 2007**
Subyek	**:**	**Kehutanan**	**Hari**	**:**	**Senin**
			Halaman	**:**	**10**

Izin Sawit Harus Distop Untuk Lindungi Hutan

[PALANGKA RAYA]Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus segera menutup pemberian izin pembukaan perkebunan kelapa sawit di wilayah itu guna melindungi jutaan hektar areal hutan setempat dari kerusakan alam yang lebih parah, kata Koordinator Save Our Borneo, Nordin.

"Kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini adalah pembukaan perkebunan sawit telah begitu banyak menghancurkan hutan-hutan tropis dan gambut di Kalteng sehingga harus segera di-stop," katanya di Palangka Raya, Senin (12/11).

Dalam 10 tahun terakhir diperkirakan sebanyak 1,2 hingga 1,4 juta hektar hutan alam di Kalimantan Tengah hancur akibat dikonversi dalam berbagai kegiatan, terutama untuk perkebunan sawit.

Padahal hutan tropis dan gambut tersebut merupakan kawasan pencegah banjir utama, pengatur tata air, dan penyeimbang keberagaman ekosistem alam di wilayah setempat.

"Selain itu pembangunan perkebunan sawit yang membabat jutaan hektar areal hutan juga telah mengabaikan hak-hak masyarakat setempat yang sebenarnya memiliki hak ulayat atas tanah sehingga sering terjadi konflik," ujarnya.

Meski kran perizinan itu distop saat ini juga, dibutuhkan waktu sekitar 50 tahunan untuk memulihkan kondisi hutan-hutan di Kalteng agar berfungsi sebagaimana mestinya.

Sehingga bila kebijakan menutup kran perizinan perkebunan sawit diberlakukan pemerintah juga harus menindaklanjutinya dengan langkah peningkatan kemampuan rehabilitasi hutan dari kemampuan saat ini yang hanya 50 ribu hektar per tahun.

Nordin menyesalkan kebijakan pemerintah daerah setempat yang selama ini lebih suka memberikan izin pembukaan perkebunan sawit di wilayah hutan atau yang masih berhutan daripada ke lahan kritis yang ada.

"Bagi pengusaha memang lebih suka membuka lahan sawit di areal hutan karena akan lebih menguntungkan dengan memanfaatkan kayu hasil 'land clearing' untuk jalan, perumahan karyawan, jembatan, dan patok batas tanpa keluar biaya," ujarnya. [Ant/M-6]

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP